

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah memiliki peran penting bagi suatu negara karena merupakan ruang dimana negara akan menjalankan kekuasaannya. Dalam sejarah kehidupan antar negara, seringkali terjadi konflik yang disebabkan oleh keinginan untuk mengekspansi wilayah negara lain, baik karena kepentingan nasional atau karena tidak jelasnya garis batas negara. Sedikitnya ada empat penyebab terjadinya perselisihan atau persengketaan yang sering timbul antara dua negara berdaulat, diantaranya adalah pertama, persengketaan garis batas teritorial (*territorial boundary dispute*), kedua, persengketaan mengenai posisi perbatasan (*positional boundary dispute*), ketiga, perselisihan mengenai fungsi-fungsi perbatasan (*functional boundary dispute*), dan keempat, sengketa perbatasan yang berkenaan dengan sumber-sumber yang terdapat di daerah tersebut seperti hutan, tambang minyak, tembaga dan sebagainya (*resource boundary dispute*) (Tuhulele, 2011).

Kasus sengketa wilayah atau perbatasan wilayah sering menimbulkan konflik antar negara karena menyangkut mengenai kedaulatan suatu negara, sehingga menjadi persoalan yang sulit untuk dinegosiasikan (*non negotiable*). Kedaulatan sendiri adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan oleh negara merdeka. Sifatnya yang *non negotiable*,

konflik mengenai teritorial menjadi persoalan yang sulit untuk diselesaikan. Hal yang sama terjadi pada kasus Jepang dan Rusia mengenai kepemilikan Kepulauan Kuril.

Sengketa kepemilikan Kepulauan Kuril bermula pada Perang Dunia II ketika Rusia yang dulunya Uni Soviet meduduki empat pulau utama di Kepulauan Kuril yang sebelumnya menjadi bagian dari wilayah Jepang. Di mana ketika berakhirnya Perang Dunia II yang dimenangkan pihak sekutu, dan Jepang sebagai pihak yang kalah harus menandatangani Perjanjian Damai. Perjanjian Damai San Fransisco tahun 1951 merupakan perjanjian yang dibuat dalam rangka untuk mengakhiri Perang Dunia II. Dalam perjanjian tersebut, Jepang selaku pihak yang kalah menyerahkan klaimnya atas Kepulauan Kuril dan menyerahkan seluruh wilayah jajahannya. Namun, Rusia selaku pihak yang menang menolak untuk menandatangani Perjanjian Damai San Fransisco tersebut (Kapur, 2012).

Alasan Rusia menolak untuk menandatangani Perjanjian Damai San Fransisco tahun 1951 karena Amerika Serikat dan negara sekutu lainnya yang menolak permintaan pihak Rusia (Kusumaningrum, 2014). Rusia meminta kepada Amerika Serikat dan sekutu untuk menjadikan Jepang sebagai pihak yang netral agar dapat menyebutkan negara mana yang berhak atas kepemilikan Kepulauan Kuril. Namun, Jepang hanya menyerahkan klaimnya atas Kepulauan Kuril kepada sekutu tanpa menyebutkan siapa yang berhak atas pulau-pulau tersebut untuk diserahkan (Seokwoo, 2001). Permintaan Rusia tersebut ditolak oleh Amerika Serikat

dan negara sekutu sehingga hal inilah yang melatarbelakangi alasan mengapa akhirnya Rusia menolak untuk menandatangani Perjanjian San Fransisco tahun 1951 (Noor, 2015). Sebelum Perjanjian Damai San Fransisco tahun 1951, hubungan antara Jepang dan Rusia sudah mulai pasang surut, hal ini ditandai dengan peperangan dan sengketa perebutan wilayah yang terjadi antara kedua negara salah satunya sengketa mengenai kepemilikan Kepulauan Kuril yang hingga saat ini belum menemukan solusi yang konkret. Pada tahun 1904 hingga 1905 Jepang dan Rusia terlibat konflik dalam perebutan wilayah di Manchuria. Ini adalah perang modern pertama antara dua kekuatan besar non-Eropa dan berakhir dengan kalahnya Rusia yang memperkuat posisi Jepang di wilayah Asia Timur (Noor, 2015). Peperangan seringkali terjadi karena adanya persaingan antara kedua negara untuk mendapatkan suatu wilayah.

Pada abad ke-19 Jepang yang mulai maju dibidang industri membutuhkan bahan baku yang tidak sedikit. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Jepang melakukan ekspansi ke beberapa wilayah di Asia Timur salah satunya China. Ekspansi yang dilakukan oleh Jepang memiliki akar yang lebih dalam dari pada sekedar untuk memenuhi kebutuhan bahan baku. Meskipun Jepang mencari bahan baku di wilayah tersebut ekspansi yang dilakukan juga dimotivasi oleh ambisi politik, strategis, dan ideologis. Jepang ingin memperluas pengaruhnya di wilayah Asia Timur. Karena ekspansi yang dilakukan oleh Jepang di wilayah tersebut sehingga Rusia merasa bahwa kepentingannya di kawasan Asia Timur akan terganggu, sehingga

menyebabkan terjadinya perang untuk memperebutkan wilayah tersebut (Noor, 2015).

Perjanjian Shimoda merupakan perjanjian pertama yang dilakukan antara Jepang dan Rusia pada tahun 1855. Dalam pasal 2 perjanjian tersebut dijelaskan mengenai batas wilayah kedua negara terletak di antara pulau Etorofu dan Uruppu (Seokwoo, 2001). Kemudian dilakukan kembali perjanjian yang disebut dengan perjanjian St. Petersburg antara Jepang dan Rusia. Perjanjian St. Petersburg tahun 1875 adalah perjanjian yang disepakati oleh kedua negara di mana dalam perjanjian tersebut ditetapkan mengenai batas wilayah di mana Jepang menerima seluruh Kepemilikan atas Kepulauan Kuril sementara Rusia hanya menguasai Pulau Sakhalin. Atas kekalahan Rusia terhadap Jepang dalam perang memperebutkan wilayah Manchuria dibuatlah Perjanjian Portsmouth pada tahun 1905 di mana dalam perjanjian tersebut Pulau Sakhalin yang merupakan milik Rusia harus dibagi dua dengan Jepang, sehingga hak Rusia atas Pulau Sakhalin hanya setengah sedangkan Jepang memiliki hak atas keseluruhan wilayah Kepulauan Kuril dan setengah dari Pulau Sakhalin (Portsmouth Peace Treaty, 2005).

Pada tahun 1941 Rusia dan Jepang melakukan perjanjian untuk mempertahankan hubungan damai dengan menandatangani Perjanjian Pakta Netralitas. Pakta ini disebut juga sebagai Perjanjian Netralitas Soviet-Jepang. Pakta tersebut menetapkan bahwa kedua negara akan mempertahankan sikap netral satu sama lain dalam konflik apapun yang

melibatkan pihak ketiga, kecuali terjadi serangan terhadap salah satu dari mereka, di mana mereka berjanji untuk tidak memihak pihak penyerang yang berlaku selama 5 tahun sejak 1941 hingga 1946 (Noor, 2015). Pada tahun 1951 dilakukan Perjanjian Damai San Fransisco namun kedua belah pihak enggan untuk menandatangani hasil dari perjanjian damai tersebut. Kemudian dibuatlah Perjanjian Damai pada tahun 1956 sebagai lanjutan dari Perjanjian Damai San Fransisco 1951 yang sama seperti perjanjian-perjanjian sebelumnya. Pada perjanjian tersebut, kedua negara juga belum menemukan solusi yang konkret untuk mengatasi sengketa wilayah di Kepulauan Kuril antara Jepang dan Rusia. Meski begitu, dalam perjanjian damai ini kedua negara menyepakati untuk menormalisasikan hubungan diplomatiknya kembali.

Kedua belah pihak baik Rusia maupun Jepang telah banyak melakukan upaya untuk mencari solusi mengenai sengketa tersebut. Perebutan wilayah antara Rusia dan Jepang terkait Kepulauan Kuril merupakan masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Meskipun ada beberapa upaya dan inisiatif untuk menyelesaikan sengketa ini, termasuk dialog tingkat tinggi dan pertukaran kunjungan resmi, belum ada kemajuan yang signifikan dalam mencapai kesepakatan akhir.

Terlepas dari hubungan antara Rusia dan Jepang yang pasang surut akibat konflik mengenai perebutan wilayah di Kepulauan Kuril. Kedua belah pihak tetap berkomitmen untuk mencari solusi yang dapat diterima secara politis dan diplomatis. Upaya-upaya untuk menyelesaikan sengketa

ini terus berlanjut meskipun perjalanan menuju penyelesaian yang akhir masih panjang dan tergolong sulit.

Kedua negara sadar bahwa isu teritorial merupakan isu yang tidak dapat dinegosiasikan, karena ketika membahas mengenai teritorial, sebagian besar negara menggunakan pendekatan konflik untuk mencapai *national interest*. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan suatu negara akan mengenyampingkan konflik untuk mencapai kepentingannya.

Baik Rusia maupun Jepang sama-sama memiliki kepentingan sumber daya energi dan geografi di Kepulauan Kuril. Namun kedua negara tetap mempertimbangkan untung rugi setiap keputusan yang akan dilakukan. Setidaknya, terdapat tiga kemungkinan yang akan terjadi ketika suatu negara terlibat sengketa wilayah, pertama negara akan terlibat konflik yang memicu adanya perang terbuka. Kedua, kedua negara (Jepang dengan Rusia) harus menetapkan *status-quo* pada wilayah yang menjadi sengketa. Dan yang terakhir adalah menggunakan alternatif kerja sama.

Kerja sama antara negara-negara seperti Jepang dan Rusia dapat digunakan untuk berbagai tujuan yang saling menguntungkan dan mempromosikan kepentingan nasional masing-masing. Karena pada dasarnya tidak ada teman dan musuh abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Maka Jepang dan Rusia memutuskan untuk menjalin hubungan kerja sama dan mulai mendiskusikan untuk melakukan kerja sama pembangunan sumber daya energi. Olehnya itu kerja sama Jepang dengan Rusia digunakan

sebagai peredam konflik demi meningkatkan hubungan baik bilateral kedua negara.

Untuk mengambil sebuah keputusan, suatu negara seringkali dihadapkan pada pengambilan keputusan yang mendesak. Begitu juga dengan Jepang, karena ingin memulihkan hubungannya dengan negara-negara di Asia dan kebutuhan energinya yang terbilang cukup besar, Jepang menimbang kebijakan energinya.

Pada Februari tahun 2013 Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida menyebutkan dalam sebuah pidato kebijakan luar negerinya yang dirangkum dalam laporan Kementerian Luar Negeri Jepang. Fumio Kishida menyebutkan bahwa:

With regard to the Japan-Russia relationship, we will make efforts, from a strategic point, for the development of cooperation in all areas, including security and economic relations, with a view to building appropriate relations as partners in the Asia-Pacific positions of Japan and Russia concerning the issue of the Northern Territories, the main pending issue between the two countries, we will work persistently toward the conclusion of a peace treaty with Russia by resolving the issue of the attribution of the four islands. In this light, we expect that the Prime Minister's visit to Russia scheduled to take place this year will lend new momentum to the development of Japan-Russia relations (Kishida, 2013).

“Berkenaan dengan hubungan Jepang dengan Rusia, kami akan melakukan upaya, dari sudut pandang strategis, untuk pengembangan kerja sama di

semua bidang, termasuk hubungan keamanan dan ekonomi, dengan tujuan untuk membina hubungan yang tepat sebagai mitra dalam posisi Asia-Pasifik. Sehubungan dengan masalah di Wilayah Utara, yang merupakan masalah utama yang tertunda antara kedua negara, kami akan bekerja keras untuk mencapai kesepakatan damai dengan Rusia dengan menyelesaikan masalah pembagian keempat pulau tersebut. Oleh karena itu, kami berharap kunjungan Perdana Menteri ke Rusia yang dijadwalkan pada tahun ini akan memberikan momentum baru bagi perkembangan hubungan Jepang dengan Rusia”(Terjemahan oleh penulis).

Pernyataan Fumio Kishida tersebut menunjukkan bahwa Jepang mengupayakan hubungan baik terkait dengan kerja sama energi dengan Rusia. Walaupun sempat menyinggung masalah isu teritorial yang belum menemukan solusi, dalam pidato tersebut Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida menyebutkan bahwa Jepang dalam meningkatkan hubungan baik dengan Rusia tidak hanya di bidang energi, Jepang akan memperluas kerja samanya dalam berbagai bidang.

Pulau Sakhalin telah menjadi topik yang menarik perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Sakhalin yang terletak di ujung timur Rusia merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam, terutama gas alam, minyak, dan mineral lainnya. Sumber daya alam yang melimpah ini menjadikan Pulau Sakhalin sebagai wilayah yang strategis dalam sektor energi global. Sebelum industri minyak dan gas berkembang pesat, perikanan menjadi sektor utama yang mendominasi perekonomian wilayah

ini. Namun, dalam beberapa dekade terakhir sektor energi khususnya minyak dan gas, telah menggantikan perikanan sebagai sumber pendapatan utama bagi wilayah tersebut. Hal ini terjadi seiring dengan ditemukannya cadangan minyak dan gas yang signifikan, yang kemudian dieksploitasi melalui berbagai proyek besar seperti Sakhalin-2.

Selain itu, wilayah Sakhalin juga semakin membuka peluang bagi investasi asing. Keberadaan sumber daya alam yang melimpah, ditambah dengan kebijakan yang mendukung investasi asing menjadikan Pulau Sakhalin sebagai lokasi yang menarik bagi perusahaan-perusahaan global untuk melakukan pengembangan sumber daya alam.

Pada tahun 1992, Marathon Oil, McDermott, dan Mitsubishi berhasil memenangkan tender yang diadakan oleh pemerintah Rusia. Pada tahun yang sama, Royal Dutch Shell bergabung dalam konsorsium tersebut. Kemudian pada tahun 1994 para pemangku kepentingan mendirikan Sakhalin Energy Investment Company Ltd yang dipimpin oleh Marathon. Sakhalin Energy melakukan negosiasi dengan perwakilan pemerintah Rusia untuk menyusun perjanjian bagi hasil (*Production Sharing Agreement*). Keputusan awal investasi difokuskan pada pengembangan ladang minyak yang dipimpin oleh Marathon. Pada tahun 2003 para mitra konsorsium memutuskan untuk melanjutkan investasi dalam proyek gas. Diperkirakan bahwa antara tahun 2005 dan 2006, anggaran proyek mengalami peningkatan. Sakhalin Energy memproduksi minyak mentah dari ladang minyak di utara Sakhalin dengan kapasitas produksi mencapai 150.000

barel per hari dan memproduksi Gas Alam Cair (LNG) sebesar 9,6 juta ton per tahun. Sekitar 60% LNG hasil produksi proyek Sakhalin II dipasok ke Jepang(Qureshi, 2022).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis meneliti dan membahas dampak dari sengketa Kepulauan Kuril terhadap kerja sama proyek Sakhalin II antara Jepang dan Rusia tersebut dalam judul “Dampak Sengketa Kepulauan Kuril Terhadap Kerja Sama Proyek Sakhalin II Antara Jepang dengan Rusia”.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada dampak sengketa Kepulauan Kuril terhadap kerja sama proyek Sakhalin II antara Jepang dengan Rusia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan masalah yang akan dikaji sebagai berikut, yakni :

1. Bagaimana keberadaan Kepulauan Kuril sebagai wilayah sengketa antara Jepang dengan Rusia?
2. Bagaimana dampak sengketa Kepulauan Kuril terhadap kerja sama proyek Sakhalin II antara Jepang dengan Rusia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut, yakni :

1. Untuk menganalisis keberadaan Kepulauan Kuril sebagai wilayah sengketa antara Jepang dengan Rusia.

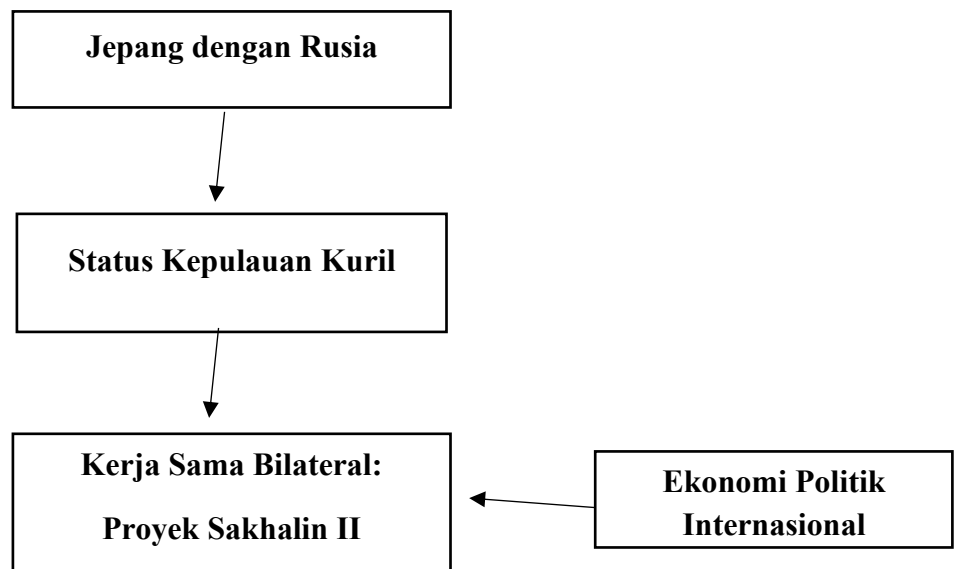
2. Untuk menganalisis dampak sengketa keulauan kuril terhadap kerja sama proyek Sakhalin II antara Jepang dengan Rusia.

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Memberikan pemahaman mengenai keberadaan Kepulauan Kuril sebagai wilayah sengketa antara Jepang dengan Rusia.
2. Memberikan pemahaman mengenai dampak Sengketa Kepulauan Kuril terhadap Kerja sama proyek Sakhalin II antara Jepang dengan Rusia

D. Kerangka Konseptual

Gambar 1. Alur Pemikiran Kerangka Konseptual



Bagian di atas merupakan operasionalisasi konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Kerangka konseptual ini menganalisis tentang dampak sengketa Kepulauan Kuril terhadap kerja sama proyek Sakhalin II antara Jepang dengan Rusia. Sengketa Kepulauan Kuril yang berlangsung selama beberapa dekade telah menciptakan ketegangan dalam hubungan bilateral

Jepang dan Rusia. Meskipun demikian, kedua negara telah berusaha untuk memperkuat kerja sama ekonomi, termasuk dalam proyek Sakhalin II. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis bagaimana sengketa Kepulauan Kuril mempengaruhi kerja sama ekonomi antara Rusia dan Jepang khususnya dalam proyek Sakhalin II, serta strategi yang digunakan oleh kedua negara untuk mengatasi dampak sengketa tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa konsep terkait guna untuk menjelaskan dan menganalisis data dalam penelitian ini. Penulis menggunakan konsep kerja sama bilateral dan ekonomi politik internasional.

1. Kerja sama Bilateral

Era modern seperti saat ini, untuk mencapai kepentingan dan untuk tetap eksis di dunia internasional konflik bukan lagi menjadi solusi untuk unjuk kekuatan ataupun untuk menyelesaikan suatu masalah. Kerja sama menjadi cara yang efektif bagi suatu negara, karena suatu negara tidak bisa jika hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Hal ini dapat dilihat pada kerja sama yang dilakukan oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat meskipun negara tersebut memiliki sumber daya alam, sumber daya energi dan teknologi yang maju tetapi tetap melakukan kerja sama dengan negara lain. Dalam konsep kerja sama internasional, kerja sama dikategorikan berdasarkan jumlah negara yang melakukan kerja sama.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep kerja sama bilateral untuk mengidentifikasi kerja sama yang dilakukan antara Jepang dan Rusia. Kerja sama bilateral merupakan kerja sama yang dilakukan oleh dua negara yang memiliki hubungan timbal balik untuk mendapatkan keuntungan dari hasil kerja sama yang dilakukan, di mana aktor dari dua pihak yang melakukan kerja sama adalah negara (Perwita & Yani, 2005). Kerja sama bilateral merupakan kondisi hubungan dua negara yang saling mempengaruhi yang diwujudkan dalam bentuk organisasi dalam rangka untuk menemukan solusi bersama terhadap suatu masalah yang meyangkut kedua negara melalui perundingan, perjanjian dan lain sebagainya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan beberapa organisasi lainnya menetapkan bahwa kerja sama yang berlangsung antara negara anggota harus berlandaskan pada pengakuan atas berdaulatnya masing-masing negara.

Pola kerja sama bilateral memiliki prinsip yang prosesnya meliputi:

1. Respon atau kebijakan aktual dari negara yang menginisiasi.
2. Persepsi dari respon tersebut oleh pembuat keputusan di negara penerima.
3. Aksi balik dari negara penerima keputusan.
4. Persepsi oleh pembuat keputusan dari negara penginisiasi (Perwita dan Yani, 2005).

Menurut Teuku May Rudy dalam buku *Studi Strategis: Dalam transformasi sistem internasional paska Perang Dingin* mengatakan bahwa, dalam membentuk sebuah kerja sama bilateral setiap negara memiliki

tujuannya masing-masing, oleh karena itu setiap negara merumuskan sebuah kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan negara tersebut (Rudy, 2002).

Kishan S. Rana mengatakan bahwa kerja sama bilateral : “dalam diplomasi bilateral konsep utama yang digunakan adalah sebuah negara akan mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan cara satu-satunya adalah dengan membuat hubungan baik dan berkepanjangan antar negara” (Rana, 2002).

2. Ekonomi Politik Internasional

Berdasarkan studi ekonomi politik internasional, hubungan antara ekonomi dan politik pada masa modern saat ini adalah suatu hubungan timbal balik. Sebagian besar politik menentukan kerangka kerja atas aktivitas ekonomi dan secara lebih lanjut mengarah pada kepentingan kelompok. Hubungan timbal-balik antara ekonomi dan politik dewasa ini semakin kompleks, sebagian besar negara menjadikan kepentingan ekonomi menjadi kepanjangan tangan dari kepentingan politik begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini hubungan bilateral Jepang dengan Rusia merupakan salah satu bentuk interaksi atau hubungan timbal balik antara politik dan ekonomi. Meskipun tidak secara mendalam namun konsep ekonomi politik internasional akan melihat bagaimana kebutuhan ekonomi dalam hubungan internasional yang semakin interdependen akan berpengaruh terhadap keputusan politik suatu negara (Kusumaningrum, 2014).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis dan menjelaskan permasalahan atau peristiwa yang diteliti. Dengan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan, di mana peneliti mengumpulkan data yang diambil dari publikasi artikel sebelumnya dan studi pustaka yang telah dikumpulkan oleh peneliti lain yang berkaitan dengan sengketa Kepulauan Kuril dan kerja sama energi antara Jepang dan Rusia.

Dalam hubungan internasional, metode kualitatif adalah teknik pengumpulan data atau strategi analisis data non numerik (Lamont, 2014). Untuk menganalisis isu-isu politik dalam hubungan internasional metode kualitatif merupakan metode yang paling sering digunakan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat eksploratif. Penelitian ini digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang hal yang mendasari suatu perilaku yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara rinci terhadap topik yang akan diteliti (Bakry, 2016).

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber bacaan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Penelitian studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data melalui bacaan

yang dijadikan referensi seperti buku, penelitian sebelumnya, artikel, catatan, dan sejenisnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang di hadapi guna mencari jawaban atas permasalahan yang ingin diselesaikan. Untuk memperkaya informasi yang dibutuhkan dalam penelitian digunakan teknik pengumpulan data berbasis data online atau internet. Peneliti memperoleh informasi yang berlimpah melalui internet seperti berita, situs online, jurnal online yang berkaitan dengan sengketa Kepulauan Kuril dan kerja sama energi antara Jepang dan Rusia.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti melalui media perantara. Yang artinya data sekunder merupakan data pelengkap dalam penelitian akan tetapi diperoleh bukan dari sumber pertama melainkan dari sumber kedua, ketiga, dan seterusnya. Data sekunder merupakan data yang diperoleh untuk mendukung informasi yang berasal dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya (Hasan, 2002).

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis untuk memudahkan penulis memperoleh kesimpulan. Teknik analisis data model Miles & Huberman terdiri tiga alur yaitu reduksi data, Penyajian data, dan menarik kesimpulan (B & Huberman A Michael, 2014). Reduksi data merupakan proses yang penting dalam

menganalisis data kualitatif sebagai proses pemusat perhatian data yang merujuk pada penyaringan dan penyusunan informasi yang diperoleh dari data kasar yang diperoleh dari catatan-catatan di lapangan. Reduksi data akan terus berlangsung selama penelitian kualitatif berlangsung. Reduksi data merupakan bagian dari bentuk analisis yang bertujuan untuk mengarahkan, menajamkan dan menyisihkan yang tidak perlu dan menggolongkan data dengan berbagai cara hingga sampai pada kesimpulan yang diverifikasi dan dapat ditarik. Miles & Huberman penyajian yang meliputi berbagai jenis matrik, grafik, jaringan, dan bagan yang dirancang untuk menggabungkan informasi agar tersusun dalam suatu bentuk yang mudah di pahami sehingga penulis dapat melihat dan menentukan apakah penarikan kesimpulan sudah dilakukan dengan benar.

5. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian deduktif yang menggunakan teori yang luas yang kemudian dibuktikan dengan penjelasan yang spesifik yang dapat mendukung pernyataan tersebut (Sari, 2017). Pesce menyatakan bahwa penalaran deduktif dikategorikan sebagai proses penalaran dan pengetahuan untuk menuntun diperolehnya kesimpulan namun metode penelitian deduktif tidak menciptakan teori baru (Pujiati, 2024).

F. Skema Pembahasan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, berikut sistematika penulisan yang dibagi kedalam beberapa bab, antara lain:

BAB 1 Pendahuluan, berisi latar belakang yang menjelaskan permasalahan, batasan, dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi teori terkait variabel-variabel yang menjadi dasar penelitian ini dengan konsep atau teori yang relevan sebagai rujukan.

BAB III Gambaran Umum, bagian ini menguraikan hubungan Jepang dengan Rusia pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II, Kepulauan Kuril, dan kerja sama Proyek Sakhalin II.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, dalam bab ini berisi hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Hasil dari pembahasan berupa keberadaan Kepulauan Kuril sebagai wilayah sengketa antara Jepang dengan Rusia dan dampak dari sengketa Kepulauan Kuril terhadap kerja sama Proyek Sakhalin II antara Jepang dengan Rusia.

BAB V Penutup, bab ini berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan program atau kegiatan serupa serta saran untuk peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerja Sama Bilateral

Kerja sama bilateral merupakan kerja sama internasional yang dilakukan oleh dua aktor di mana aktor utamanya merupakan negara yang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional kedua negara. Kerja sama yang dilakukan secara bilateral dapat meliputi kerja sama politik, budaya, pendidikan, dan ekonomi. Dalam hubungan internasional, kerja sama bilateral cenderung lebih banyak dilakukan dibandingkan dengan kerja sama multilateral (Rudi, 2002).

Kerja sama dapat berjalan baik melalui berbagai cara yang berbeda-beda, kebanyakan cara yang dilakukan berbentuk kerja sama yang terjadi pada dua pemerintah yang memiliki kepentingan masing-masing atau karena sedang menghadapi masalah yang serupa. Beberapa organisasi seperti PBB menetapkan bahwa kerja sama yang berlangsung di antara negara para anggota organisasi harus berdasarkan adanya pengakuan kedaulatan nasional masing-masing negara. Dikatakan sebagai kerja sama bilateral ketika kerja sama dilakukan antara dua pemerintah yang berdaulat dalam rangka untuk mencapai kepentingan atau mencari penyelesaian masalah yang sedang dihadapi yang menyangkut kedua negara tersebut melalui perjanjian, perundingan dan sejenisnya. Oleh karena itu kerja sama bilateral merupakan hubungan antara dua negara yang saling mempengaruhi yang dimanifestasikan dalam bentuk kooperasi (Perwita, 2021).

Dalam dunia internasional, kerja sama terbentuk karena adanya interaksi internasional yang meliputi berbagai macam bidang seperti ideologi, politik, sosial, dan budaya, lingkungan hidup, pertahanan, dan keamanan. Untuk melihat isu utama dalam kerja sama internasional yang dilakukan oleh suatu negara dapat dilihat berdasarkan pada progres keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerja sama tersebut. Kerja sama akan tercipta karena adanya hubungan timbal balik dari masing-masing negara untuk mencapai kepentingan internalnya sehingga suatu kerja sama tidak dapat terjadi begitu saja ketika negara hanya berusaha mencapai tujuannya sendiri. Menurut Teuku May Rudy dalam buku *Studi Strategis: Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin* mengatakan bahwa, untuk membentuk sebuah kerja sama khususnya kerja sama bilateral setiap negara harus memiliki tujuannya masing-masing, oleh karena itu dalam kerja sama internasional setiap negara merumuskan kebijakan yang menyangkut mengenai kepentingan nasional negara tersebut (Rudy, 2002).

Dalam kerja sama bilateral pertukaran informasi, teknologi, keahlian sumber daya manusia juga termasuk dalam bentuk kerja sama antar dua negara yang memiliki kepentingan yang sama dan untuk mencapai keuntungan bersama. Seperti dalam kerja sama dalam bidang ekonomi, kerja sama bilateral dapat meliputi perdagangan bebas, investasi, dan pembangunan infrastruktur. Kemudian dalam bidang keamanan kerja sama bilateral meliputi pertukaran informasi dan kerja sama untuk menangani atau mencegah ancaman keamanan di dunia internasional seperti terorisme.

Era modern sekarang ini kerja sama digunakan sebagai alternatif untuk memperkuat hubungan diplomatik satu negara dengan negara lainnya. Sama halnya dengan kerja sama bilateral yang dapat memperkuat hubungan diplomatik antar dua negara dalam berbagai bidang dan dapat memperkuat posisi mereka di dunia internasional dengan menunjukkan eksistensinya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan kedua negara dan mengurangi konflik yang mungkin terjadi di masa depan. Sebagai contoh beberapa forum internasional yang dapat memberikan dukungan kepada negara-negara yang ada di dalamnya seperti PBB dan G20.

Dalam melaksanakan kerja sama bilateral dibutuhkan sebuah kesepakatan dan komitmen dari kedua negara untuk mencapai tujuan bersama yang di tandangani secara resmi dan mengikat secara hukum. Dalam pengimplementasiannya kerja sama bilateral dapat memberikan manfaat bagi kedua negara namun begitu pula sebaliknya, kerja sama tersebut dapat menimbulkan konflik ketika kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, adanya perbedaan kepentingan, dan yang lebih fatal adalah pelanggaran perjanjian. Oleh karena itu, kerja sama bilateral harus berdasar pada prinsip saling menguntungkan dan kerja sama yang adil serta menghormati kedaulatan negara masing-masing.

Eksistensi kerja sama bilateral dalam suatu negara kemungkinan sama tuanya dengan konsep konflik. Sejak munculnya pemikiran aktor-aktor hubungan internasional untuk melakukan konflik, saat itu pula para aktor itupun juga mulai berpikir tentang kerja sama. Seperti pada saat jaman dahulu ketika

negara-kota Sparta merencanakan perlawanan dari dominasi negara-kota Athena, para pemimpin Sparta kemudian melakukan kerja sama (sejenis aliansi) dengan beberapa negara-kota lainnya. Oleh karena itu, konsep konflik dan kerja sama hadir sebagai dua hal yang saling terikat mewarnai fenomena hubungan dalam dunia internasional sejak dahulu kala. Sejak kelahiran studi hubungan internasional sebagai disiplin ilmu, kerja sama antar negara (*international cooperation*) telah menjadi fokus perhatian utama dalam studi hubungan internasional. Pada zaman itu kerja sama dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan perdamaian dunia sehingga dapat mencegah terjadinya peperangan. Namun kini orientasi kerja sama mencakup hal yang lebih luas ke berbagai bidang dan menjadi kebutuhan hampir semua negara di dunia. Meningkatnya interaksi yang dilakukan antar negara dalam bentuk kerja sama, mendorong studi hubungan internasional untuk tetap menjadikan kerja sama sebagai salah satu konsep dasar (*basic concept*) yang fundamental bersama dengan sejumlah konsep lainnya.

Hubungan bilateral antara dua negara berarti memiliki saling ketergantungan antarnegara. Masing-masing negara tentu memiliki kekurangan di tengah keunggulan komparatifnya sehingga timbul rasa saling ketergantungan. Karena adanya kekurangan dan keunggulan suatu negara sehingga mendorong lahirnya kerja sama bilateral maupun multilateral. Pada intinya kerja sama ini menyebabkan adanya rasa saling ketergantungan sehingga suatu negara membutuhkan satu sama lain.

Penelitian ini mengadopsi konsep kerja sama bilateral untuk menganalisis hubungan antara Jepang dan Rusia dalam sektor energi. Kerja sama bilateral merujuk pada hubungan antara dua negara yang didasarkan pada kepentingan bersama dan perjanjian yang disepakati untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, Jepang dan Rusia memiliki kepentingan strategis dalam sektor energi. Jepang, sebagai negara dengan ketergantungan tinggi pada impor energi, berupaya untuk mengamankan pasokan energi yang stabil. Sementara itu, Rusia, sebagai salah satu produsen energi terbesar di dunia, berusaha memperluas pasar ekspornya dan memperkuat hubungan ekonomi dengan negara mitra. Penelitian ini akan mengkaji dinamika kerja sama bilateral antara kedua negara dalam bidang energi, termasuk faktor-faktor yang mendorong kerja sama, tantangan yang dihadapi, serta dampak kerja sama tersebut terhadap hubungan ekonomi dan politik kedua negara.

B. Ekonomi Politik Internasional

Sejak tahun 1970-an ekonomi politik internasional telah menjadi kajian dalam disiplin ilmu hubungan internasional. Pada saat itu beberapa negara mengalami krisis minyak karena negara-negara pengekspor minyak menghentikan ekspor minyak buminya. Hal tersebut mengakibatkan tidak stabilnya politik dan ekonomi beberapa negara di dunia. Akibat krisis ini, para pemegang kekuasaan kemudian sadar bahwa faktor ekonomi sangat penting dan menentukan proses dan arah politik kedepannya, begitu pula sebaliknya bahwa ekonomi dan politik adalah hubungan yang saling tarik menarik dan tidak dapat dipisahkan.

Ekonomi politik internasional pada dasarnya sudah diterapkan oleh negara-negara sejak lama. Awalnya ekonomi dan politik dianggap sebagai dua hal yang berbeda dan terpisah, sehingga kemudian ekonomi dan politik dianggap adalah sebuah hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain yang hingga saat ini ekonomi politik internasional telah menjadi salah satu kajian yang akan selalu digunakan dan akan mengalami pembaruan setiap waktunya. Oleh karena itu ekonomi politik internasional merupakan salah satu kajian yang menarik dalam studi hubungan internasional sehingga menarik untuk dikaji.

Ekonomi politik internasional merupakan hubungan timbal balik antara kepentingan kekuasaan dan kekayaan dalam hubungan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa teori ekonomi politik internasional bukan merupakan teori ekonomi murni, yang artinya dalam teori tersebut tidak hanya membahas ekonomi secara teknis melainkan ada campur tangan politik didalamnya. Namun lebih dari itu, teori ekonomi politik internasional memiliki fungsi untuk menjelaskan kaitan antara faktor-faktor ekonomi dan politik, pasar dan negara dalam dunia internasional.

Dalam hal ini hubungan bilateral Jepang dengan Rusia merupakan salah satu bentuk interaksi atau hubungan timbal balik antara politik dan ekonomi. Meskipun tidak secara mendalam namun konsep ekonomi politik internasional akan melihat bagaimana kebutuhan ekonomi dalam hubungan internasional yang semakin interdependen akan berpengaruh terhadap keputusan politik suatu negara (Kusumaningrum, 2014).